



**PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Gajah Mada No. 90 Penatoi Kota Bima



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan KaruniaNya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu laporan yang akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mengevaluasi kegiatan yang telah direncanakan selama 1 Tahun Anggaran berjalan. Menyadari hal itu maka penyusunannya senantiasa melibatkan setiap level organisasi/bidang yang ada dan hasilnya telah disosialisasikan kepada masing-masing bidang sebagai penanggung jawab dari kegiatan yang ada maupun unsur organisasi lainnya guna mendapat masukan agar keberhasilan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Tahun 2020 dapat dicapai secara maksimal.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKIP Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima di masa mendatang.



Bima, 17 Februari 2021

Kepala Dinas Kominfotik

Drs. H. Sukri, M.Si

NIP. 19620323 198912 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	3
1.5. Lingkungan Strategis yang berpengaruh	8
1.6. Anggaran	10
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis	12
2.2. Rencana Kerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Keuangan	26
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	
1 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin Diskominfo Kota Bima Tahun 2020	
2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
3 Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020	

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Diskominfo dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bima, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-

undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKIP Diskominfo Kota Bima Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima adalah sebagai berikut:

- a) UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 adalah :

- a. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya,
- b. Sebagai parameter penilaian kinerja OPD
- c. Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di komunikasi dan informasi,
- e. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja SKPD pada periode kerja selanjutnya
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya
- g. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota bima.

Tugas :

Membantu Kepala Daerah dalam hal kebijakan, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah

daerah di bidang komunikasi dan desiminasi informatika, pengelolaan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) dan persandian serta tugas pembantuan.

Fungsi :

- a) Pengordinasian Pembinaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik bagi badan-badan publik instansi Pemerintah Daerah;
- b) Pengordinasian Strategi Pengembangan Pemerintahan berbasis elektronik (e-Goverment), Smart City dan GCIO (Goverment Chief Information Office) di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- c) Pengordinasian pembangunan jaringan komunikasi/telekomunikasi dan pengamanan akses informasi guna memfasilitasi hubungan komunikasi antara SKPD Lingkup Pemerintah Daerah.
- d) Pengordinasian dan pembinaan penyelenggaraan Program Pelayanan administrasi perijinan di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan;
- e) Penyelenggaraan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan;
- f) Pengordinasian pembinaan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan);
- g) Pengordinasian dan pembinaan Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi serta sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- h) Sebagai ketua harian PPID dan mengoordinasikan pembinaan PPID di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
- i) Penyelenggara pusat data terintegrasi lingkup Pemerintah Daerah dan infrastruktur pendukungnya.
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan Fungsinya

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Nilai yang terkandung dari pengertian serta karakteristik *good governance* tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana, karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini perlu adanya akuntabilitas dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi, mengingat prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan agar supaya memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Kondisi semacam ini mensyaratkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat, harus bertanggung jawab kepada publik serta kepada institusi *stakeholders*. Disamping itu, institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga pemerintah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dituntut untuk dapat mewujudkan *Smart City dan E-Governance* atau *Kepemerintahan yang baik*. Pengertian *Kepemerintahan yang baik (good governance)*, dapat diidentifikasi dengan indikator-indikator yang terkandung didalamnya. UNDP (LAN; 2000) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut :

- *Participation* ; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- *Rule of law* ; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
- *Transparancy* ; Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
- *Responsive* ; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stake holders.

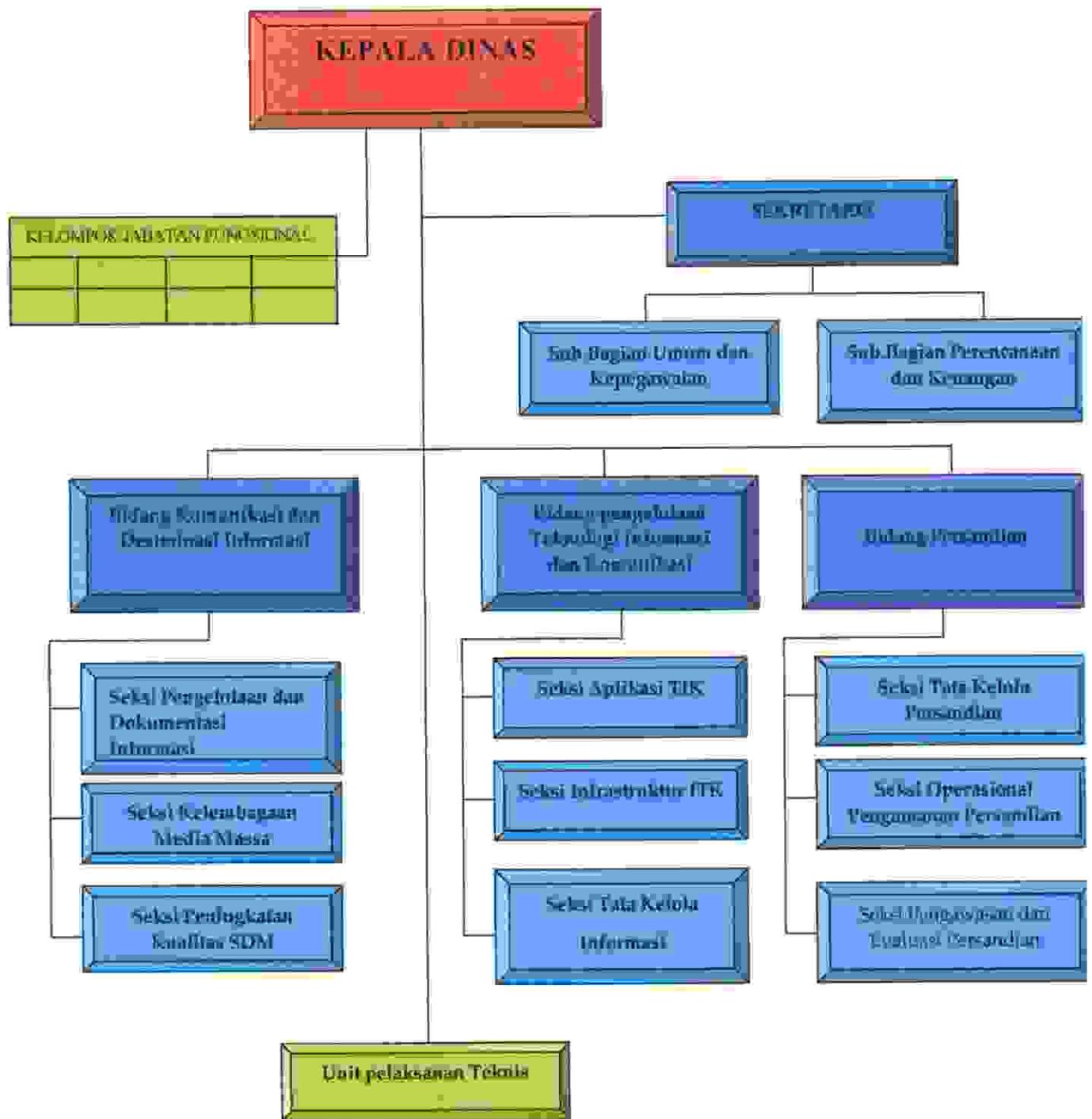
- *Consensus Orientation ; Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- *Equity* ; Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- *Effectiveness and effeciency* ; Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- *Accountability* ; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Strategic vision ; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini

Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima mempunyai Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan ufnksi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan informatika :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BIMA**



1.5. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

1.5.1 Kondisi Geografis dan Kependudukan Kota Bima

Secara geografis Kota Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118°41'00"-118°48'00" Bujur Timur dan 8°20'00"-8°30'00" Lintang Selatan. Tingkat curah hujan rata-rata 132,58 mm dengan hari hujan: rata-rata 10,08 hari/bulan. Sementara matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran rata-rata 21 °C sampai 30,8 °C. suhu tertinggi terjadi pada Bulan Oktober dengan suhu berkisar 37,2 °C sampai 38 °C. Luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 km² terdiri dari 5 Kecamatan dan 41 Kelurahan. Kondisi sosial masyarakat yang beragam juga menjadikan lingkungan strategis yang berpengaruh dalam penyelenggaraan urusan komunikasi, informasi dan persandian di Kota Bima.

1.5.2. Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai yaitu 24 personil dengan tingkat pendidikan :

1. S-2 : 4 orang
2. S-1 : 17 orang
3. D-3 / Sarmud : 2 orang
4. SLTA : 1 orang

Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat signifikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan, tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1
Keadaan Personil
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima
(Desember 2019)

NO.	ESELON	GOLONGAN (Orang)				STRATA PENDIDIKAN			
		IV	III	II	I	SLTA	DIII	S-1	S-2
1.	II	1	-	-	-	-	-	1	-
2.	III	3	1	-	-	-	-	3	1
3.	IV	2	9	-	-	-	1	7	3
4.	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Staf	-	7	1	-	1	1	7	-
J U M L A H		5	17	2	-	1	2	18	4

Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima adalah sebagai berikut :

- Eselon II/b : 1 jabatan
- Eselon III/a : 1 jabatan
- Eselon III/b : 3 jabatan
- Eselon IV/a : 11 jabatan

Gambaran tentang jabatan/eselon dan personilnya berdasarkan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel .2.
SDM Berdasarkan Eselonisasi

NO.	GOL./RUANG	ESELON					
		IV-b	IV-a	III-b	III-a	II-b	II-a
1.	IVc	-	-	-	-	1	-
2.	IVb	-	1	1	1	-	-
3.	IVa	-	1	1	-	-	-
4.	IIIId	-	4	1	-	-	-
5.	IIIc	-	5	-	-	-	-
6.	IIIb	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		0	11	3	1	1	-

1.5.3. Perlengkapan

Asset perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berupa sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Daftar Jenis Barang Pendukung Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bima
Per 31 Desember 2020

No	Jenis Brang	Jumlah
1.	Kendaraan Roda Empat	1
2.	Kendaraan Roda Dua	3
3.	Komputer	14
4.	Printer	13
5.	Laptop	16
6.	Internet	4
7.	Meja Kerja	26
8.	Kursi Kerja	30
9.	Filing Kabinet	13
10.	Ac	10
11.	Server	4

1.6 Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2020 Dinas Komunikas dan Informatika Kota Bima didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah tahun 2020 sebesar Rp 14.713.918.587,00,- Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 2.064.235.687,70,00,- Belanja langsung Rp 12.649.682.900,00,-.

Tabel 4
Jumlah Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika

Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2020	Anggaran Tahun 2019
Belanja Tidak Langsung	2.064.235.687,70	1.967.322.278,00
Belanja Langsung	12.649.682.900,00	5.197.036.000,00

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini merupakan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima selama Tahun 2020 yang

dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019 sehingga tercermin tingkat keberhasilan organisasi tahun 2020.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Kota Bima berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah , sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Lingkungan Strategis yang berpengaruh
- 1.6. Anggaran
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

- 2.1.1 Visi
- 2.1.2 Misi
- 2.1.3 Tujuan
- 2.1.4. Sasaran
- 2.1.5. Strategi Pencapaian
- 2.1.6. Kebijakan

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan tahun 2019
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2020 dengan Target Terakhir Rencana Strategis
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

2.1. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor - faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor- faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan stratejik tingkat PD berupa dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan stratejik tingkat kota berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023.

2.1.1 Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi Kota Bima tahun 2018 – 2023 adalah :

"Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan SETARA (Sejahtera, Transparan, Akuntabilitas, Ramah dan Agamais) menuju masyarakat maju dan mandiri".

2.1.2 Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, Misi Pemerintah Kota Bima yang sesuai dengan tugas dan fungsi dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima 2018-2023, yaitu :

“Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik”

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Bima Tahun 2018-2023 adalah :

“Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”

2.1.4 Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sasaran merupakan (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 dalam upaya menuju tercapainya visi Dinas Komunikasi dan Informatika, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik
3. Meningkatnya keamanan informasi daerah

Guna mengukur Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika serta target-targetnya , kami sajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	20%	50%	70%	85%	95%
2.				Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Predikat, kategori A untuk PLID Kota Bima	B	A	A	A	A
3.				Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	40%	50%	60%	75%	95%

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2019-2023

2.1.5 Strategi

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi
2. Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan pembangunan skala Kota
3. Peningkatan pelayanan persandian

2.1.6 Kebijakan

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan, yang meliputi :

1. Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelayanan publik administrasi
2. Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan)
3. Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan masyarakat kota terkait dengan program-program pembangunan

4. Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
5. Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

Tabel 6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD

Visi : "Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan SETARA (Sejahtera, Transparan, Akuntabilitas, Ramah dan Agamis) menuju masyarakat maju dan mandiri".			
Misi 3 : Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelayanan publik administrasi
			Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan)
	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan pembangunan skala Kota	Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan masyarakat kota terkait dengan program-program pembangunan
Meningkatnya keamanan informasi daerah		Peningkatan pelayanan persandian	Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
			Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

Program yang diakomodir dalam Renstra OPD Dinas Komunikasi, dan Informatika Kota Bima berjumlah 7 (tujuh) Program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Program dan Kegiatan Tahun 2020

No	Program / Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Penyediaan jasa surat menyurat
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Penyediaan jasa kebersihan kantor
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
	Penyediaan alat tulis kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	Penyediaan makanan dan minuman
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD
4.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	Pengelolaan Kelembagaan PPID
	Pembinaan Media Cetak dan Elektronik

5.	Program Pengadaan Perangkat Aplikasi Dan Telematika
	Pengembangan Aplikasi
	Penyusunan Regulasi Pengelolaan TIK
	Pembinaan dan Pengelolaan TIK
	Pengembangan dan Pengawasan Jaringan TIK
	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
	Monev Teknologi informasi dan Komunikasi
	Bimtek Aplikasi Teknologi informasi dan Komunikasi
	Pengembangan Fasilitas dan Prasarana Media Center
8.	Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika
	Pelayanan Operator Emergency Call (Panggilan Darurat 112)
	Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat
	Pengawasan Penggunaan Frekwensi Radio Lokal
10.	Program Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
	Pengamanan Layanan Informasi Daerah
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Persandian
	Edukasi Kesadaran Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
	Edukasi Kesadaran Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
	Pengamanan Jaringan

2.2 RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan rencana kinerja sebagai berikut :

Tabel 8
Rencana Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Formula	Target
				2020
1.	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	Jumlah OPD yang mempunyai layanan SPBE / Jumlah OPD x 100%	50%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	Hasil Penilaian Komisi Informasi Propinsi NTB	A
3	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	Jumlah Serangan yang Tertangani / Jumlah Serangan yang Masuk x100%	50%

Sumber : Dokumen Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018-2023.

Selanjutnya sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka rencana kinerja tahunan ditetapkan sebagai penetapan OPD dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/MPAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparaturnya sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparaturnya.

Adapun penetapan kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 9
Penetapan Kinerja

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	50%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Meningkatnya keamanan informasi daerah	Predikat katagori A. untuk PLID Kota Bima Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	A
3.	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	50%

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk memberikan jawaban dan penjelasan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra OPD

. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Oleh karena itu salah satu cara untuk mengukur Keberhasilan OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan mengukur capaian kinerja menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2020 sebagaimana tabel 10, sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	50%	50%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	A	A	100%
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	50%	50%	100 %

Berdasarkan tabel 10 diatas maka tingkat capaian target untuk tiga Sasaran Strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima tahun 2020 adalah 100% dengan kategori capaian sangat tinggi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan tahun 2019

Tahun 2020 merupakan tahun kedua RPJMD periode 2018-2023, data realisasi kinerja Tahun 2020 mempunyai indikator sasaran yang berbeda dengan tahun 2019, hal ini disebabkan adanya review atas sasaran dan indikator pada awal tahun 2020.

Adapun data pencapaian target dan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima tahun 2020

Tabel 11
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	50%	50%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	A	A	100, %
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	50%	50%	100 %

Tabel 12
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Layanan TIK Pemerintah dan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1,31	65,50%
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	62,60	62,64	100,06%
Meningkatnya keamanan informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	40%	40%	100 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2020 dengan Target Terakhir Rencana Strategis

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima sampai Tahun 2020 dengan target terakhir rencana strategis sebagaimana tabel 13 berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Terakhir Rencana Strategis

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1.	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	95%	50%	52,63%
2.	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	A	A	100%
3.	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	95%	50%	52,63%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Nasional

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2020 dengan target nasional, sebagaimana tabel 14 berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi / Rata-Rata Nasional
1.	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	50%	
2.	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	A	
3.	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	50%	

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Analisa capaian kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2020 disajikan sebagaimana tabel 15 berikut:

Tabel 15
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
1	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	50%	50%	100%
2	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	A	A	100%
3	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	50%	50%	100 %

• **Indikator Kinerja 1.**

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2020 adalah 50% dari yang ditargetkan sebesar 50%. Dengan demikian diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian sangat tinggi.

1. Faktor pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi yang ada dilakukan oleh tim teknis yang sudah familier dengan aplikasi tersebut.
- Penyediaan bandwith dan pemeliharaan jaringan komputer dapat berjalan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua karena sudah terencana dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu.

2. Analisis Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan sasaran IKU ini ditemukan permasalahan antara lain:

- Bentang geografis Kota Bima yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya
- Masih banyak kesenjangan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi

- Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika lingkup Pemerintah Kota Bima
- Masih adanya blankspot area di beberapa wilayah Kota Bima
- Belum adanya integrasi aplikasi pada semua SKPD teknis

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di update baik melalui media cetak maupun media elektronik dan website.
- Bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan mengadakan pelatihan pengelolaan website.
- Bimbingan teknis pada operator SKPD dalam pengelolaan komunikasi dan informatika
- Mengajukan permohonan fasilitasi jaringan telekomunikasi untuk blankspot area di wilayah Kota Bima kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo.
- Di Tahun 2021 dilaksanakan integrasi aplikasi.

- **Indikator Kinerja 2.**

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2020 adalah A dari yang ditargetkan sebesar A. Dengan demikian diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian sangat tinggi.

1. Faktor pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Pengelolaan Website PLID yang sesuai dengan SOP.
- Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik antara SKPD terkait data yang dibutuhkan.
- Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua karena sudah terencana dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu.

2. Analisis Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan sasaran IKU ini ditemukan permasalahan antara lain:

- Belum optimalnya SDM pengelola website PLID Pembantu tiap-tiap SKPD.
- Masih banyak kesenjangan masyarakat dalam pengetahuannya tentang PLID

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- Bimbingan teknis pada operator SKPD dalam pengelolaan website PLID.
- Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di update baik melalui media cetak maupun media elektronik dan website yang terkait PLID.

- **Indikator Kinerja 3.**

Berdasarkan tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2020 adalah 50% dari yang ditargetkan sebesar 50%. Dengan demikian diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian sangat tinggi.

1. Faktor pendukung keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- Pengelolaan email sanapati yang sesuai SOP
- Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima terkait data kasus kebocoran informasi daerah.
- Kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana semua karena sudah terencana dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu.

2. Analisis Permasalahan/Kendala/Solusi

Dalam melaksanakan sasaran IKU ini ditemukan permasalahan antara lain:

- Belum optimalnya SDM pengelola email sanapati.
- Belum adanya pejabat fungsional Sandiman

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- Bimbingan teknis pada operator pengelola email sanapati
- Mengirimkan ASN untuk mengikuti diklat sandiman.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2020 meliputi:

a. Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan IKU Tahun 2020 sebesar 98,24%, yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.713.918.587,00 dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 14.455.458.318,00 dengan demikian mengalami efisiensi sebesar Rp. 258.460.269,00.

b. Sarana dan Prasarana

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana antara lain dapat dilihat dari:

- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengumpulan dan pengelolaan database daerah, sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan dengan real time sebelum pengiriman dokumen fisik.
- Dalam pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat, dilakukan melalui aplikasi Call Center 112 Kota Bima sehingga untuk masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat kota dapat menghemat biaya dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan, sekaligus langsung didistribusikan kepada SKPD terkait agar segera ditindaklanjuti.
- Dalam pengelolaan keamanan informasi dan persandian berbasis IT, menggunakan metode enkripsi yang dikembangkan sendiri pada semua aplikasi dan peralatan jaringan komputer. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan bila menggunakan pihak ketiga.

c. Sumberdaya Manusia

Dengan didukung jumlah SDM sebanyak 24 ASN, 2 Orang Tebaga IT dan 29 Orang Tenaga Kontrak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dapat memperoleh capaian kinerja 100,00%. Hal ini dilakukan antara lain dengan melaksanakan penambahan beban tugas dan jam kerja pegawai serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas, serta melibatkan tim teknis pada beberapa kegiatan. Namun demikian hal tersebut bukan merupakan kondisi yang ideal bagi

organisasi. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung akan menurunkan kinerja personil yang berdampak kepada menurunnya kinerja organisasi.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran ini antara lain:

- Tersedianya ruang Data Center yang representatif dan nyaman serta berada dalam gedung yang sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan koordinasi. Adanya dukungan AC, SDM yang memadai, sehingga memudahkan untuk distribusi data dan internet .
- Adanya programmer yang selalu siap setiap saat bila dibutuhkan.
- Dukungan dari semua SKPD dalam implementasi tata kelola teknologi informasi.
- Antusiasme Tim Pengelola Informasi dan kelompok-kelompok informasi yang sudah dibentuk.
- Terjalannya kemitraan dengan media massa dan media online, yang membantu sebagian publikasi.
- Dukungan dari semua SKPD lingkup Pemkot Bima dalam publikasi melalui website dan interpersonal dapat membantu penyampaian informasi kepada masyarakat, meskipun publikasi melalui media cetak dan media luar ruang.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2020, kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.713.918.587,00 dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 14.455.458.318,00 atau sebesar 98,24%. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dari target belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.064.235.687,70 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima mampu merealisasikan sebesar Rp. 2.016.792.143,00 atau sebesar 97,70%. Adapun terkait belanja langsung, dari target

yang ditetapkan sebesar Rp. 12.649.682.900,00 telah mampu direalisasikan sebesar Rp. 12.438.666.175,00 atau sebesar 98,33 %. Dengan demikian, presentase realisasi anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima terdiri dari 97,70 % belanja tidak langsung dan 98,33 % belanja langsung.

Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rekapitulasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	2.064.235.687,70	2.016.792.143,00	97,70
2	Belanja Langsung	12.649.682.900,00	12.438.666.175,00	98,33
	Jumlah	14.713.918.587,00	14.455.458.318,00	98,24

Selama Tahun Anggaran 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima melaksanakan 4 (Empat) Program Utama dan 17 (tujuh belas) kegiatan utama. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	Program Pengadaan Perangkat Aplikasi Dan Telematika	9.026.262.000,00	8.918.754.127,00	98,81
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Predikat kategori A untuk PLID Kota Bima	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	309.999.000,00	303.972.808,00	98,06
			Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika	861.710.000,00	846.958.230,00	98,29
3	Meningkatnya Keamanan Informasi daerah	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	Program Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	244.088.500,00	214.236.382,00	87,77 %
	Jumlah			10.442.059.500,00	10.405.703.007,00	99,65

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama Tahun Anggaran 2020, pagu anggaran pelaksanaan program/kegiatan utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima adalah sebesar Rp. 10.442.059.500,00 dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 10.405.703.007,00 atau sebesar 99,65%.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada lampiran I.

PENUTUP

BAB

IV

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2020 merupakan tahun pertama implementasi RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 dan Renstra Diskominfo Tahun 2018-2023.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama Tahun 2020.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja Tahun 2020 semuanya telah direalisasikan dengan baik kategori Berhasil dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 100%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 99,65%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2020 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Komunikasi dan Informasi pada Tahun 2020 telah berjalan dengan baik.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika

tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Diskominfo melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah permasalahan dan kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini merupakan tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu, secara umum organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima perlu memperkuat peran kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima yang lebih baik di masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diupayakan diantaranya:

1. Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas antar bidang dan evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta penataan koordinasi dan administrasi yang baik.
2. Optimalisasi sistem perencanaan dan pengendalian daerah yang berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan sebagai upaya tersedianya data dan informasi yang cepat, akurat dan aktual serta kualitas analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
3. Mengembangkan serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional perencana yang diharapkan akan dapat membawa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima menjadi institusi Komunikasi dan Informasi daerah yang kredibel dan professional. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.
4. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima.



Bima, 17 Februari 2021
Kepala Dinas Kominfo

Drs. H. Sukri, M.Si
NIP. 19620323 198912 1 001

LAMPIRAN

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin Diskominfo Kota Bima Tahun 2020

1. Program dan Kegiatan

No	Urusan Yang Dilaksanakan	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Kegiatan
1.	Komunikasi dan Informatika	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.904.095.000,00	Rp 1.854.175.428,00
		1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 325.500.000,00	Rp 325.500.000,00
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 608.298.000,00	Rp 595.767.056,00
		3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 4.000.000,00	Rp 1.374.250,00
		4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 56.100.000,00	Rp 56.099.000,00
		5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 31.910.000,00	Rp 31.907.000,00
		6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 15.000.000,00	Rp 14.995.000,00
		7. Penyediaan alat tulis kantor	Rp 41.975.000,00	Rp 41.974.800,00
		8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 72.450.000,00	Rp 71.770.000,00
		9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Rp 7.172.000,00	Rp 7.168.700,00
		10. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 332.170.000,00	Rp 301.812.000,00
		11. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 211.920.000,00	Rp 208.250.000,00
		12. Penyediaan makanan dan minuman	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00
		13. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 172.600.000,00	Rp 172.557.622,00
2.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 130.934.400,00	Rp 130.400.000,00
		1. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	Rp 19.600.000,00	Rp 19.200.000,00
		2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 65.000.000,00	Rp 64.999.000,00
		3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 46.334.400,00	Rp 46.201.000,00
3.		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 172.594.000,00	Rp 170.169.200,00
		1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 84.288.000,00	Rp 81.887.000,00
		2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Rp 17.058.000,00	Rp 17.057.200,00
		3. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 13.673.000,00	Rp 13.673.000,00
		4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Rp 39.119.000,00	Rp 39.096.000,00
		5. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Rp 18.456.000,00	Rp 18.456.000,00
JUMLAH			Rp 2.207.623.400,00	Rp 2.154.744.628,00